

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepariwisataan memiliki peranan yang penting guna memperluas serta memberikan peranan untuk meratakan kesempatan berusaha serta mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta budaya, sehingga selain dapat meningkatkan mutu objek pariwisata juga mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup (Baskoro, 2018). Peran dari sektor pariwisata juga dapat menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pengangguran dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal disekitarnya (SULAEMAN, 2017).

Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendorong pengembangan pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Semarang mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, yang mana tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan pasal 2 ayat (6) adalah untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas destinasi pariwisata yang mana akan memberikan dampak dalam memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah, merebaknya kabar mengenai objek wisata dengan memanfaatkan platform pada berbagai media dengan efisien, efektif serta dapat dipertanggung jawabkan, mampu mewujudkan usaha kepariwisataan sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah serta

memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, adanya perkembangan pada lembaga pariwisata dan pengelolaan pariwisata yang dapat menyatukan antara pembangunan pada destinasi wisata, pemasaran wisata dan usaha wisata.

Sasaran yang dituju dalam membangun pariwisata sesuai dengan pasal 2 ayat (7) adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari bidang kepariwisataan, meningkatkan kuantitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata, meningkatkan produk domestik regional bruto di sektor pariwisata serta mengembangkan strategi dan program pariwisata.

Pariwisata yang ada pada Kabupaten Semarang sendiri terbagi atas pariwisata buatan, pariwisata sejarah dan budaya, serta pariwisata alam. Objek Pariwisata Air Terjun Semarang yang berada di Desa Gogik merupakan satu-satunya objek wisata dimana objek wisata ini memiliki keindahan alam serta lingkungan yang masih asri, adapun pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Semarang ini dilakukan oleh kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik.

Tabel 1.1

Data Jumlah Wisatawan Destinasi Wisata Alam Kabupaten Semarang Tahun  
2015-2020

Objek Wisata	Jumlah Pengunjung					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Wisata Alam	38.988	88.136	73.569	67.908	68.988	18.009
2. Wana WisataPenggaron	10.182	10.490	8.215	4.938	4.419	703
3. Air Terjun Semirang	14.680	14.107	12.815	9.343	11.930	2.862
4. Curug Kembar Bolodewo	5.449	6.388	3.986	7.040	-	-
5. Curug Tujuh Bidadari	8.677	14.822	20.954	25.700	13.039	2.217
6. Air Terjun Curug Lawe	-	31.900	19.036	20.887	39.600	12.227

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Data pada tabel 1.1 adapat dilihat bahwa pada wisata alam di Kabupaten Semarang ini didominasi oleh objek wisata air terjun, berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2015-2017 atau dengan kata lain sebelum ditetapkannya Kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang. Objek Pariwisata Air Terjun Semirang mengalami penurunan jumlah pengunjung wisata yaitu berjumlah 14.680 pengunjung di tahun 2015, pada tahun 2016 pengunjung terjadi menurunnya jumlah wisata dengan jumlah wisatawan sebanyak 14.107,

pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dengan jumlah pengunjung sebanyak 12.815 pada tahun 2018 juga mengalami penurunan jumlah pengunjung menjadi 9.343 dan pada tahun 2019 objek wisata Air Terjun Semirang ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan sehingga jumlah pengunjung menjadi sebanyak 11.930 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.862 pengunjung. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga memberikan dampak yaitu semakin menurunnya jumlah wisatawan sebanyak 50% serta pada awal terjadinya pandemi COVID-19 Wisata Air Terjun Semirang harus ditutup selama tiga bulan yang menyebabkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tidak memiliki pemasukan keuangan, meskipun pada masa New Normal Wisata Air Terjun Semirang diperbolehkan untuk dibuka kembali namun pada spot kolam renang harus ditutup sebagai upaya untuk pencegahan penularan COVID-19, tidak hanya itu untuk menuju wisata air terjun terdapat beberapa tracking atau jalan yang berbahaya namun tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang memadai dan pada musim penghujan akses untuk menuju air terjun juga ditutup mengingat keselamatan serta untuk keamanan bagi pengunjung, serta dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pihak LMDH sehingga pihak LMDH sendiri hanya mampu mengirimkan petugas keamanan yang bertugas untuk mengecek kondisi serta berpatroli pada kawasan menuju air terjun sebanyak dua kali saja dalam seminggu.

Apabila pengelolaan Wisata Air Terjun Semirang ini berada dibawah Dinas Pariwisata, maka pemerintah memberikan dana untuk pengembangan wisata serta akan gencar dalam melakukan promosi wisata melalui media sosial, namun hal tersebut juga berdampak kepada masyarakat sekitar Wisata Air Terjun Semirang yang mencari penghasilan dengan berdagang di kawasan

Wisata Air Terjun Semarang, sebab apabila pengelolaan diserahkan kepada Dinas Pariwisata maka masyarakat yang berdagang di kawasan sekitar Wisata Air Terjun Semarang akan dipungut biaya sewa tempat, sedangkan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh LMDH masyarakat yang berdagang pada kawasan Wisata Air Terjun Semarang tidak dipungut untuk biaya tempat.

Wana Wisata Air Terjun Semarang ini adalah objek wisata satu-satunya yang berada pada kawasan Dusun Gintungan, Desa Gogik yang memiliki keindahan alam serta lingkungan asri dan sejuk, dimana permasalahan yang dihadapi oleh LMDH Desa Gogik sebagai pengelola Objek Wisata Air Terjun Semarang seperti jumlah wisatawan yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2020 serta didominasi oleh penurunan jumlah wisatawan yang dapat dilihat pada tabel 1.1, membuat peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh LMDH sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan sesuai dengan tujuan yang tertera dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

No 1	Nama/Tahun Penelitian 2	Judul Penelitian 3	Tujuan Penelitian 4	Metode Penelitian 5	Hasil 6
1.	Ari Irawan (2017)	Implementation of Tourism Sector Development Policy through Demarketing in Improving SME in Banyuwangi	Untuk menentukan impelentasi kebijakan pariwisata di Banyuwangi dan dampak dari kebijakan bagi sektor UMKM	Kulitatif	Hasil menunjukkan bahwa landasan program kepariwisataan dari perencanaan dan impelentasi dapat mencakup industri pariwisata, destinasi pariwisata, lembaga pariwisata, pemasaran pariwisata menjadi lebih baik. Impelentasi dengan menggunakan strategi pemasaran memberikan dampak positif bagi kelestasian alam, sehingga konsep pariwisata yang berkelanjutan dapat disadarkan.

1	2	3	4	5	6
2.	Yerik Afrianto Singgalen, dkk (2017)	Evaluation of the Implementation of Tourism Policy	Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata di Pulau Bobale, Pulau Kakara, Pulau Tagakaya dan Pulau Meti di Halmahera Utara	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi, komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata
3.	Dwi Atmaji, Zuly Qodir (2021)	Policy Implementation to Improve Tourism Destination based on Local Wisdom in Gunungkidul District	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi kebijakan dapat meningkatkan jumlah wisatawan berdasarkan kearifan lokal	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa tidak adanya implementasi yang berdasar pada kearifan lokal yaitu nilai dari konservasi sumber daya alam, sosial, suku dan moral. Komunikasi implementasi kebijakan antara kelompok sasaran dan pemerintah sudah cukup baik namun terhadap aktor swasta belum optimal

1	2	3	4	5	6
4.	Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, dkk (2020)	Tourism Policy and the Impact of Tourism on Bali Island	<p>Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari aktivitas alam, aktivitas kebudayaan, aktivitas rekreasi dan peningkatan infrastruktur pada pengembangan pariwisata dan moderasi kualitas destinasi terkait industri pariwisata Indonesia</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas destinasi moderasi berhubungan dengan aktivitas kebudayaan, kebijakan dan pengembangan kepariwisataan</p>



1	2	3	4	5	6
5.	Yi Guo, dkk (2019)	A Sustainable Tourism Policy Research Review	Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai analisis proses pengembangan dan ekstrak kerangka subjek penelitiannya sebagai referensi penelitian dimasa mendatang	Tinjauan sistematis	Pengembangan dan Implementasi kebijakan pariwisata keberlanjutan merupakan respon yang efektif untuk tantangan lingkungan global dan pengembangan keberlanjutan
6.	Emelyn Novalisa, dkk (2017)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan didalam pembangunan sektor pariwisata daerah sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan otda	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan. Kebutuhan perlunya kebijakan teknis yang dibuat menghasilkan kebijakan alternatif yang berupa pengelolaan potensi sumberdaya serta kebijakan mengenai penataan kawasan.

1	2	3	4	5	6
7.	Feki Lahamadi, dkk	Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara)	Bertujuan untuk melihat bagaimana Dinpar atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berada di Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan implementasi kebijakan	Kualitatif	Hasil menunjukkan usaha yang telah diupayakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum mampu untuk mengeksplor dan manajemen keindahan Pantai Kuno dikarenakan beberapa faktor yang menghambat para implementor dan <i>policy maker</i> dalam mengimplementasi kebijakan kepariwisataan dalam pembangunannya di Pulau Kumo
8.	Eka Christanti (2019)	Implementasi Kebijakan Pariwisata berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Kasus Kabupatn Kotawaringin Barat)	Untuk membahas implementasi kebijakan pariwisata berdasarkan kearifan lokal di Tanjung Puting, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat	Kualitatif	Implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah serta lingkungan maupun perekonomian.

1	2	3	4	5	6
9.	Okta Sulaeman (2017)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya	Penelitian ini menunjukkan implementasi sebuah kebijakan yang berjalan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan dengan baik dikarenakan aspek-aspek yang belum terpenuhi yang merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata.
10.	G.A Kristha Adelia Indraningsih (2019)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu	Penelitian ini untuk melihat bagaimana pengembangan pariwisata melalui implementasi kebijakan yang menggunakan model yang dikembangkan oleh Edwards	Kualitatif	Implementasi Kebijakan telah berjalan dengan baik meskipun tidak lepas dari beberapa masalah yang ditemui.

Penelitian terdahulu memberikan manfaat berupa tambahan ilmu bagi peneliti dan juga sebagai referensi sumber literatur, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memberikan gambaran mengenai pengembangan pariwisata dengan ranah yang lebih luas, dan juga dimanfaatkan sebagai perbandingan dan juga pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana perbedaan terletak pada lokus penelitian yang mengambil Objek Wisata Air Terjun Semirang yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Wana Wisata Air Terjun

Semirang sendiri merupakan satu-satunya objek wisata alam yang berada di Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dimana Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang ini merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam bidang kepariwisataan seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata, melakukan promosi wisata guna tersebarnya informasi objek wisata dan berkembangnya kelembagaan yang mengelola pariwisata ini kurang sejalan dengan permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan seperti banyaknya sarana prasarana yang kurang layak digunakan, pengelolaan yang dilakukan LMDH Desa Gogik masih belum maksimal.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kabupaten Semarang?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung atau menghambat implementasi Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kabupaten Semarang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang .
2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai suatu kajian yang berguna bagi penelitian yang dilakukan dimasa mendatang, memberikan ilmu pengetahuan baru serta dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan teori.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan dapat membuka pemahaman peneliti serta dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan oleh Administrasi Publik mengenai implementasi kebijakan pariwisata yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

#### b. Bagi LMDH Desa Gogik

Hasil dari penelitian dimaksudkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan baru bagi LMDH Desa Gogik dalam melaksanakan implementasi kebijakan kepariwisataan di objek pariwisata Air Terjun Semirang.

#### c. Bagi Civitas Akademika

Hasil dari penelitian dimaksudkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tambahan dan sumber literatur bagi mahasiswa Administrasi Publik khususnya pada mahasiswa Universitas Diponegoro dan untuk mahasiswa pada umumnya.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Administrasi Publik**

Chandler & Plano (Pasolong, 2013: 7) mendefinisikan mengenai administrasi publik yaitu bahwa administrasi publik adalah sebuah

penggabungan antara *art and science* atau seni dan keilmuan yang mana bertujuan untuk memberikan pengaturan terhadap “*public affairs*” serta pelaksanaan berbagai tugas yang menyangkut pemerintahan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu sebagai dari bagian yang merupakan disiplin ilmu, administrasi publik hadir untuk turut membantu dalam menyelesaikan serta memecahkan berbagai permasalahan publik yang terjadi dengan melalui perbaikan pada beberapa bidang, seperti pada bidang sumber daya manusia, bidang organisasi, dan bidang keuangan (Pasolong 2013, 8). Nicholas Henry (Pasolong, 2013: 8) mendefinisikan sebagai perpaduan yang kompleks antara praktik dan teori yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah didalam hubungannya dengan warga negara yang diperintah serta memberikan dorongan atas responsifitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga berusaha membuat praktik-praktik manajemen yang terdapat pada administrasi publik agar dapat berjalan sesuai dengan value efisiensi, efektivitas serta pemenuhan kebutuhan masyarakat agar dapat lebih baik (Pasolong, 2013: 8). Sedangkan definisi yang diberikan oleh Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (Pasolong, 2013: 7) mengartikan administrasi publik sebagai (1) suatu implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan telah dilakukan penetapan kebijakan oleh badan perwakilan politik (2) Pengaturan usaha-usaha perseorangan dan kumpulan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang melibatkan tugas sehari-hari pemerintah (3) suatu tindakan yang melibatkan dengan menjalankan kebijakan-kebjakan pemerintah, pemberian petunjuk, kemampuan dan teknik-teknik yang tidak dapat terhitung banyaknya, memberikan petunjuk serta tujuan kepada usaha beberapa orang.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai administrasi publik yang disampaikan berdasarkan pendapat ahli-ahli yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai administrasi publik yang merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dan dituangkan melalui kebijakan atau program guna menyelesaikan permasalahan publik yang ada.

### **1.7.2 Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2013: 28-30) membagi perkembangan paradigma Administrasi Publik kedalam lima paradigma antara lain adalah :

- a. Paradigma pertama yang berlangsung pada tahun 1900-1926 ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi, sedangkan lokus pada paradigma ini tidak begitu dipermasalahkan, adapun prinsip administrasi ini dipandang sama atau bersifat universal yang dapat diterapkan pada seluruh bentuk organisasi dan juga lingkungan sosial budaya. Atau dengan kata lain meskipun berbeda negara, keudayaan, berbeda bentuk organisasi, visi, lingkungan dan lainnya prinsip administrasi ini dapat diterapkan. Menurut Luther H Gulick dan Lyndall Urwick berpendapat bahwa fokus memegang peranan yang penting dibandingkan dengan lokus, sehingga prinsip sangat penting dalam administrasi sebagai ilmu didalam karya tulisnya "*Paper on the Science of Administration*" dan prinsip yang paling dikenal adalah POSDCORB yaitu *Planning* atau perencanaan, *Organization* atau pengorganisasian, *Staffing* atau kepegawaian, *Directing* atau pengarahan, *Reporting* atau pelaporan, *Budgeting* atau penganggaran.
- b. Paradigma kedua berlangsung pada tahun 1927-1937 yaitu adanya dikotomi antara politik dan administrasi. Adapun lokus dari paradigma

ini adalah permasalahan dimana seharusnya administrasi dan politik negara, pada paradigma ini administrasi berpusat pada birokrasi pemerintahan sehingga permasalahan-permasalahan administrasi hanya seputar pada organisasi, kepegawaian serta penyusunan anggaran birokrasi.

- c. Paradigma ketiga dimana administrasi negara yang berperan sebagai keilmuan politik berlangsung pada tahun 1950-1970, dalam masa paradigma penetapan kembali antara administrasi negara dan ilmu politik dengan hubungan konseptualnya. Selain itu pada saat paradigma ini berlangsung administrasi negara merupakan peranan yang termasuk kedalam bagian ilmu politik. Permasalahan dari paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintahan dan menimbulkan krisis identitas administrasi negara dimana pada saat paradigma ini berlangsung ilmu politik mendominasi terhadap administrasi negara.
- d. Paradigma keempat yang berlangsung pada tahun 1956-1970 dimana pada masa ini prinsip-prinsip yang dikembangkan kembali adalah manajemen dan administrasi negara sebagai disiplin ilmu administrasi publik. Menurut Keith M. Hederson fokus dari paradigma ini adalah pada teori organisasi sehingga adanya perkembangan ilmu yaitu ilmu pengembangan organisasi sebagai spesialisasi dari ilmu administrasi.
- e. Paradigma kelima ini berlangsung sejak tahun 1970 dimana pengembangan dari ilmu administrasi negara dimana lokus dari administrasi negara pada pengembangan kelompok organisasi atau *Organizational Development* (OD) yang selanjutnya berkembang pula ilmu-ilmu baru yaitu seperti ilmu kebijakan, analisis, politik ekonomi dan lain-lain.



Setelah itu pada awal tahun 1980an atau lebih tepatnya pada 1982 adanya beberapa pandangan yang merinci mengenai kategori administrasi publik setelah perkembangan paradigma yang dikemukakan oleh Nicholas Henry. *Paradigma New Public Management* (NPM) hadir atas banyaknya kritik terhadap teori-teori neoklasik dan teori klasik administrasi publik yang berdampak pada penyelenggaraan administrasi publik dan juga pembaharuannya. Konsep ini merupakan pandangan baru atas konsep administrasi publik, dimana konsep ini dapat digunakan baik dalam bagian privat dan juga pada bagian publik sesuai dengan kebutuhan. Konsep *New Public Management* juga hadir karena krisis mengenai kesejahteraan yang terjadi pada beberapa negara seperti negara Amerika, New Zealand, Australia, Inggris yang mana pada negara-negara tersebut terjadinya perkembangan dalam sektor politik, ekonomi, sosial dan lingkungan administrasi publik secara bersamaan atas keinginan perubahan pengelolaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada setiap lapisan masyarakat sehingga pengelolaan pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan efektif dimana pemerintah dituntut untuk lebih berinovasi atau dapat melaksanakan kebijakan privatisasi terhadap fungsi pemerintahan sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal dan juga menghapus monopoli pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat atau publik yang tidak efisien.

Paradigma selanjutnya adalah *New Public Service* dimana pandangan ini hadir atas penentangan paradigma-paradigma sebelumnya yaitu *Old Public Management* dan *New Public Management* dengan mengembangkan teori mengenai demokrasi dimana perbedaan, hak asasi warga negara dan partisipasi lebih dihargai sehingga kepentingan publik

sebagai hasil dari dialog yang memuat bermacam nilai atau value yang terdapat pada tengah-tengah warga negara dengan berpirinsip pada nilai-nilai seperti pada transparansi, keadilan, serta nilai akuntabilitas. Pada konsep NPS ini lebih mengedepankan pada birokrasi untuk warga negara bukan pelanggan. Dalam konsep ini juga masyarakat dilibatkan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan seperti pada penyusunan perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi dengan tujuan agar menciptakan pemerintahan yang lebih baik dengan prinsip nilai yaitu pada demokrasi dan sebagai tindakan preventif terjadinya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kalangan birokrat.

### **1.7.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan beberapa putusan yang dibawa oleh individu, pelaku atau sekumpulan politik dalam menyelenggarakan pemilihan arah dengan usaha demi tercapainya arah tersebut, dalam dasarnya pihak yang melakukan pembuatan kebijakan memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Carl J. Federick (Abdal, 2015: 35) menjelaskan kebijakan sebagai rangkaian dari suatu tindakan yang digagas oleh individu, sekumpulan atau lembaga pemerintahan yang berada dalam lingkup lingkungan tertentu di dalamnya terdapat hambatan atau kesuliotan serta kesempatan untuk melaksanakan usulan dari kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Pasolong, 2013: 39) adalah keputusan-keputusan pemerintah yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, apabila pemerintah memiliki suatu pilihan untuk dilaksanakan maka pemerintah harus memiliki tujuan atau arah serta kebijakan publik tersebut termasuk aksi pemerintah sehingga tidak hanya merupakan pernyataan yang

menunjukkan keinginan dari pejabat pemerintahan maupun pemerintah itu sendiri.

Kebijakan publik menurut Anderson (Tachjan, 2006: 16) diartikan sebagai kebijakan dimana kebijakan tersebut telah dilakukan pengembangan oleh pejabat pemerintah maupun badan pemerintahan. Adapun menurut Hoogerwerf (Tachjan, 2006: 16) tujuan kebijakan adalah diarahkan untuk melangsungkan serta pemeliharaan mengenai ketertiban umum dimana fungsi negara adalah sebagai stabilisator, memberikan kelancaran terhadap masyarakat yang mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan dimana fungsi negara adalah sebagai stimulator dan perangsang, fungsi negara sebagai koordinator dalam hal ini menyesuaikan berbagai aktivitas serta melakukan pembagian materi dimana negara adalah sebagai alokator atau pembagi. Menurut Shrhfritz & Russel (Pasolong 2013, 39) memberikan definisi terhadap kebijakan publik dengan sederhana yaitu "*is whatever government decides to do or not to do*" atau dalam terjemahan dikatakan sebagai apapun yang diputuskan oleh pejabat pemerintah maupun pemerintah mengenai apa yang akan dilaksanakan maupun apa yang tidak dilaksanakan.

David Easton (Abdal, 2015: 38) mengartikan kebijakan publik sebagai penentuan nilai kewenangan bagi seluruh warga negara yang terikat keberadaannya, dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengupayakan suatu tindakan terhadap masyarakatnya dan tindakan yang dimaksud adalah upaya dari sesuatu yang telah ditentukan dari pemerintah yang merupakan bentuk alokasi atas pembagian berbagai nilai-nilai terhadap masyarakat, sehingga definisi menurut David Easton ini kebijakan publik dikategorikan sebagai rangkaian proses manajemen dan kerja pejabat publik. Dunn (Tachjan 2006, 18) mengklasifikasikan pelaku-

pelaku yang terikat dalam kebijakan (*stakeholders*) terdiri dari aktor pembuat kebijakan, aktor pelaksana kebijakan serta kelompok-kelompok yang dituju sebagai sasaran kebijakan. Aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan sendiri merupakan sekelompok individu, orang atau organisasi tertentu yang memiliki peranan yang andil didalam kebijakan, hal tersebut dikarenakan posisi mempengaruhi baik pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan. Kelompok sasaran merupakan individu, atau sekelompok individu, kesatuan dalam warga negara yang keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

Charles O. Jones (Abdal, 2015: 40) berpendapat bahwa kebijakan publik harus terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

- a. *Goals* atau maksud yang ingin diraih
- b. *Plans* atau rencana yang bersifat khusus untuk meraih arah
- c. Program atau usaha yang akan dilakukan demi tercapainya arahan dan maksud
- d. *Decision* atau keputusan yang merupakan kegiatan untuk memberikan keputusan tujuan, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program yang telah dilaksanakan
- e. Efek yaitu akibat yang ditimbulkan dari program yang dilaksanakan baik yang disengaja atau tidak disengaja.

Kebijakan publik didalamnya memuat proses perumusan kebijakan publik, menurut Awan Abdoellah (Abdoellah, 2006: 37-42) proses atau tahapan perumusan kebijakan terdiri atas :

- a. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), yaitu penentuan masalah publik yang perlu dipecahkan. Masalah publik memiliki beberapa syarat menurut Hesel dalam (Abdoellah, 2006: 38), yaitu :

1. Memberikan efek kepada kepentingan masyarakat
  2. Membuat analog dengan cara memancing menggunakan kebijakan-kebijakan publik dimana sebelumnya sudah diimplementasikan
  3. Permasalahan tersebut dapat dihubungkan dengan simbol nasional atau politik yang ada
  4. Adanya *market failure* atau kegagalan pasar
  5. Adanya teknologi serta anggaran untuk menyelesaikan masalah publik.
- b. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*), yaitu tahapan yang mana untuk mempersiapkan serta memberikan masukan untuk perumusan kebijakan melalui dukungan para *stakeholder*.
- c. Perumusan Kebijakan Publik, yaitu tahapan untuk merumuskan asumsi yang berkaitan dengan kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai pemecahan permasalahan yang dapat berbentuk tuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi atau legitimasi, pengesahan serta dilakukannya implementasi, pengawasan dan upaya untuk meninjau kembali maupun umpan balik. Tahap perumusan kebijakan publik ini melibatkan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok seperti akademisi atau ilmuwan, administrator, politisi serta pemimpin organisasi menurut Don K. Price (Abdoellah, 2006: 42). Dalam pembuatan sebuah kebijakan terdapat setidaknya tiga teori yang sering digunakan, yaitu teori rasional komprehensif, teori inkremental, dan teori pengamatan terpadu (*mixed scanning theory*).

Pendapat-pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk

memecahkan permasalahan publik dengan melakukan tindakan alternatif untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

#### **1.7.4 Implementasi Kebijakan**

Implementasi berdasarkan definisi Masmanian dan Sabatier (Tachjan, 2006: 79) memandang implementasi dari sebuah kebijakan sebagai suatu bentuk pelaksanaan kegiatan dari bermacam keputusan-keputusan baik yang mana keputusan ini dibuat oleh lembaga pemerintah legislatif, lembaga pemerintah eksekutif dan lembaga pemerintah yudikatif. Edwards III (Tachjan, 2006: 25) mendefinisikan “*policy implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy and consequences of the policy for the people whom it affects*” maksudnya adalah implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan dari pembuatan kebijakan diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk masyarakat yang mempengaruhinya. Menurut Jones (Kasmad R, 2003: 34) implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan secara efektif sehingga implementasi kebijakan berisikan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju. Grindle (Tachjan, 2006: 25) mendefinisikan “*implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*” atau maksudnya implementasi merupakan sebuah proses general dari suatu tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkatan program spesifik..

Implementasi kebijakan harus mengandung tiga unsur yang penting yaitu:

- a. proses yang merupakan serangkaian kegiatan nyata yang dilaksanakan sebagai upaya demi perwujudan arah yang sebelumnya sudah ditentukan
- b. tujuan yaitu hal yang dikehendaki untuk dicapai melalui kegiatan yang dilakukan
- c. hasil atau dampak yang yang dapat dirasakan oleh berbagai kumpulan sasaran yang berupa manfaat yang nyata.

Dye (Kasmad R, 2003: 37) mengungkapkan dalam proses kebijakan publik terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

1. *problem identification* (identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan)
2. *formulation* (formulasi kebijakan)
3. *legitimation* (legitimasi kebijakan)
4. *implementation* (implementasi kebijakan)
5. *evaluation* (evaluasi kebijakan)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai faktor maupun variabel yang memberikan pengaruh pada suatu implementasi, terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh berbagai ahli, diantaranya :

#### 1. Model George Edwards III

Model yang dikemukakan oleh George Edwards III (Abdoellah, 2006: 68) mengatakan bahwa keberhasilan (pendorong) dan kegagalan (menghambat) dalam suatu implementasi kebijakan publik tidak dapat terlepas dari empat faktor, adapun faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan adalah :

- a. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi merupakan faktor utama penting ketika suatu implementasi kebijakan dilaksanakan suatu implementasi kebijakan, sebagaimana yang diketahui dalam penyampaian komunikasi yang baik dan jelas yang dilakukan oleh pelaksana maka suatu program dapat terlaksana pula dengan baik. Penyampaian suatu informasi terdiri dari berbagai proses yang memuat proses transmisi, proses kejelasan informasi serta proses konsistensi terhadap informasi-informasi yang disampaikan.

b. *Resources* (Sumber Daya)

Empat komponen yang setidaknya tercakup dalam sumber daya, yaitu pegawai yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup baik, dalam pengambilan sebuah keputusan diperlukannya informasi-informasi maupun data pendukung, adanya sebuah kewenangan atau kekuasaan dalam menjalani tugas, serta dalam pelaksanaannya terdapat fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan.

c. *Dispositions* (Disposisi)

Disposisi merupakan sikap serta komitmen dari pelaksana terhadap sebuah program, terutama bagi implementor yang mana dalam hal ini adalah aparatur birokrasi.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi yang didalamnya terdapat suatu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan program yang dapat dilaksanakan, dimana apabila hal ini tidak tersedia, maka akan sulit untuk meraih tujuan secara maksimal.

2. Model Van Metter dan Van Horn

Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa didalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan, selain



itu hal lainnya adalah menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja yang dipisahkan oleh beberapa variabel bebas yang saling berhubungan, variabel tersebut adalah :

- a. Arah dari suatu kebijakan dan ukuran dari kebijakan
- b. Sumber dari suatu kebijakan
- c. Karakteristik instansi
- d. Komunikasi antar organisasi yang terkait dan kegiatan pelaksanaan
- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel kebijakan yang terakit dengan tujuan kebijakan adalah sumber kebijakan yang tersedia. Karakteristik instansi berupa suatu organisasi atau sekumpulan pelaksana yang bersifat formal maupun informal, adapun terkait dengan komunikasi yang terjalin diantara organisasi yang terhubung dengan suatu prlaksanaan program kegiatan yang pelaksanaannya terdapat hubungan antara kelompok sasaran dengan lingkungan sistem politik (Subianto, 2020: 68-69)

### 3. Model *Top Down* oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Subianto, 2020: 71-72)seringkali disebut dengan “*top down approach*” dimana para ahli tersebut merumuskan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan publik yang sempurna atau *perfect implementation*, persyaratan tersebut adalah :

- a. Situasi luar atau eksternal yang dialami oleh institusi yang melaksanakannya, tidak memberikan suatu masalah berupa kendala atau gangguan yang serius
- b. Terdapatnya waktu serta berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatan progran yang cukup memadai

- c. Tersedianya kombinasi dari berbagai sumber yang dibutuhkan
- d. Kebijakan yang akan dilaksanakan harus dilandasi oleh perihal hubungan kausal yang handal
- e. Hubungan kausal tersebut memiliki sifat secara langsung serta memiliki sedikit rantai penghubung
- f. Hubungan yang saling menggantungkan haruslah kecil
- g. Pemahaman dan kesepakatan tujuan yang mendalam
- h. Perincian penugasan dan ketepatan dalam penempatan urutan
- i. Koordinasi serta komunikasi yang baik
- j. Penuntutan dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan serta adanya kepatuhan yang sempurna.

#### 4. Model *Bottom-Up* oleh Warwic

Model yang dikemukakan oleh Warwic (Kadji, 2015 : 70-71) dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan melihat faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain :

##### a. Kemampuan organisasi

Kemampuan organisasi pada tahap ini adalah sebagai kemampuan anggota organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan pada sebuah organisasi, dimana didalam kemampuan organisasi ini terdapat tiga unsur utama yaitu (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi yang beroperasi pada bidang terkait, (iii) meningkatkan sistem pelayanan dan pengembangan *Standard Operating Procedures (SOP)*.

##### b. Informasi

Informasi dalam hal ini adalah kurangnya informasi yang disampaikan dari para aktor kepada kelompok sasaran kebijakan

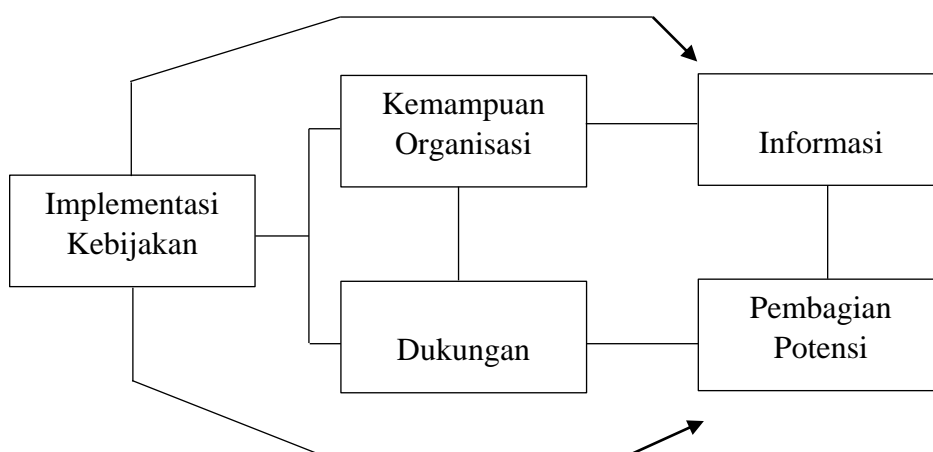
dimana kurangnya komunikasi antara aktor dengan kelompok sasaran kebijakan.

c. Dukungan

Dukungan dalam hal ini adalah berkaitan dengan kesediaan dari sasaran kelompok kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan.

d. Pembagian potensi

Pembagian potensi dalam hal ini berkenaan dengan pembagian wewenang dan tanggungjawab dengan adanya pembagian penugasan yang jelas serta batasan-batasannya.



Gambar 1.2.1 : Model Implementasi Kebijakan Warwick (Kadji, 2015 : 70)

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli diatas mengenai implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau sekumpulan organisasi yang mana memiliki tujuan dalam meraih arah serta maksud yang sebelumnya sudah disepakati didalam suatu keputusan kebijakan.

### 1.7.5 Implementasi Kebijakan Kepariwisata

Pariwisata menurut Hunziger dan Krapf (Isdarmanto, 2017 :3) adalah jaringan serta gejala yang memiliki keterkaitan dengan tinggalnya seseorang disuatu tempat dimana orang tersebut tidak memiliki aktivitas *major activity* atau pekerjaan utama yang dapat memberikan orang tersebut sebuah keuntungan dengan sifat sementara atau permanen. Sedangkan menurut Isdarmanto (Isdarmanto, 2017 :4) pariwisata merupakan aktifitas dalam waktu yang senggang dan digunakan untuk mengisi waktu senggang tersebut dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, waktu bersantai, melakukan studi, kegiatan agama bahkan untuk berkegiatan olahraga dan dari aktifitas tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku secara psikis maupun fisik baik sementara atau dalam jangka waktu tertentu dan untuk jangka panjang. Menurut Mariyani (Isdarmanto, 2017 :4) perjalanan yang dapat dikategorikan suatu perjalanan dalam wisata apabila sudah dalam tiga persyaratan sudah dipenuhi adapun persyaratan tersebut, yaitu :

1. Tidak dimaksudkan untuk menetap lama dan bersifat sementara
2. Perjalanan wisata yang dilakukan murni atas kemauan sendiri, tidak adanya paksaan atau bersifat sukarela
3. Dalam perjalanan wisata tersebut tidak melakukan aktifitas pekerjaan yang mana dapat menghasilkan upah atau bayaran.

Soebagio (Isdarmanto, 2017 : 4) berpendapat mengenai pariwisata adalah gejala serta hubungan yang akan nampak dari adanya suatu perjalanan seorang individu diluar wilayah yang ditematinya yang bertujuan tidak hanya diperuntukkan menetap serta tidak memiliki

kaitannya dengan suatu aktifitas pekerjaan untuk menghasilkan suatu bayaran.

Kepariwisataan dijelaskan sebagai gejala yang menggambarkan kepergian individu didalam negaranya sendiri atau individu yang bukan berasal dari negaranya sendiri (Isdarmanto, 2017 : 4). Kepariwisataan juga dapat digunakan sebagai suatu alat yang digunakna untuk meminimalisir kesenjangan antar negara-negara sumber wisatawan dengan melakukan hubungan yang baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi serta teknologi. Menurut *World Trade Organization* (WTO) (Isdarmanto, 2017 :9-10) terdapat lima unsur penting yang harus tersedia dan dikelola dalam kepariwisataan, yaitu :

- a. Maksud tujuan dari kunjungan dan jenis aktivitas yang dapat dilakukan
- b. Tempat wisata atau lokasi dari wisata yang dapat dituju
- c. Aksesibilitas yang dapat ditempuh
- d. Rencana atau perkiraan lamanya waktu untuk tinggal (*length of stay*)
- e. Sarana prasarana dan fasilitas serta pelayanan atau service dimana hal ini disediakan oleh para pelaku usaha pariwisata yang bermanfaat dan dapat dirasakan manfaatnya.

Kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perda tersebut merupakan dokumen mengenai rencana pada sektor kepariwisataan untuk pembangunan pada daerah Kabupaten Semarang dalam jangka periode waktu lima tahun yang terhitung semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, tujuan

sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tersebut.

Tujuan dari Kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas serta kuantitas pada destinasi wisata
- b. Memanfaatkan berbagai media untuk memasarkan informasi mengenai destinasi wisata secara efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan
- c. Mampu menggerakkan perekonomian pada daerah dengan mewujudkan industri pariwisata yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan setiap masyarakat
- d. Mampu mengembangkan kelembagaan didalam kepariwisataan serta tata kelola dalam kepariwisataan sehingga dapat menyatukan pembangunan pada destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata serta industri pariwisata

### **1.8 Operasionalisasi Konsep**

Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan ini merupakan peraturan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dituangkan dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, untuk melihat implementasi kebijakan dalam hal ini dapat dilihat dari :

- a. Kuantitas dan kualitas destinasi wisata

Kuantitas destinasi wisata dalam hal ini berkaitan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung serta sarana dan prasarana objek wisata. Kualitas destinasi wisata yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai pelayanan kepariwisataa yang diberikan oleh LMDH Desa Gogik telah memenuhi kepuasan wisatawan seperti keramahan petugas, pemberian

informasi oleh petugas LMDH yang berjaga serta kelayakan sarana dan prasarana yang terdapat dalam Wana Wisata Air Terjun Semarang.

b. Promosi wisata

Promosi wisata dalam hal ini adalah upaya LMDH Desa Gogik untuk mengenalkan wisata dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook serta apakah pihak LMDH Desa Gogik melakukan promosi wisata melalui event pariwisata.

c. Kelembagaan kepariwisataan

Aspek yang dimaksud adalah program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) upaya yang dilakukan oleh LMDH Desa Gogik, seperti jumlah anggota yang tergabung dalam LMDH Desa Gogik, tingkat pendidikan anggota LMDH Desa Gogik, serta pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing anggota LMDH Desa Gogik.

Hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam implementasi ini dapat dilihat dari, antara lain :

a. Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi memuat tiga unsur pokok didalamnya, diantaranya adalah :

1. Kemampuan teknis yang dimiliki anggota LMDH Desa Gogik untuk mengelola Objek Wisata Air Terjun Semarang
2. Kemampuan pihak LMDH Desa Gogik dalam menjalin suatu hubungan dengan organisasi lain yang bidang yang sama (koordinasi dengan organisasi terkait)
3. Adanya upaya peningkatan sistem pelayanan dengan mengembangkan *Standard Operating Procedures* (SOP) didalam LMDH Desa Gogik

b. Informasi

Informasi dalam hal ini adalah komunikasi dari pembuat kebijakan dengan pihak LMDH Desa Gogik selaku pengelola objek wisata Air Terjun Semirang mengenai kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang.

c. Dukungan

Dukungan dalam hal ini adalah kesediaan anggota LMDH Desa Gogik dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang dan kepatuhan dari anggota LMDH Desa Gogik dalam melaksanakan kebijakan.

d. Pembagian Potensi

Pembagian potensi dalam hal ini adalah mengenai pembagian wewenang serta tanggungjawab yang dilimpahkan kepada setiap anggota LMDH Desa Gogik serta adanya batasan yang jelas dalam pembagian tugas.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Desain yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif atau yang disebut juga postpositivistik dimana penelitian ini dilandasi oleh filsafat *post positivisme*. Menurut Mantra (Siyoto & Sodik, 2015: 28) metode penelitian yang menggunakan kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk memberikan hasil data deskriptif yang berupa kata, kalimat maupun ucapan lisan yang bersumber dari orang dan kegiatan yang diamati, dalam metode kualitatif ini memberikan hasil dari keunikan yang ada didalam orang, masyarakat, sekumpulan atau organisasi yang ditemui



dalam kehidupan sehari-hari dengan menyeluruh dan rinci sekaligus mendalam serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah atau *natural setting*. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif ini akan menghasilkan penelitian yang lebih rinci dan mendalam dengan menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti (Siyoto & Sodik, 2015 : 28). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial atau fenomena yang sedang dikaji oleh peneliti berdasarkan sudut pandang partisipan. Berdasarkan teori mengenai penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti diharuskan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian atau wilayah penelitian berlangsung. Adapun situs penelitian ini adalah pada Objek Pariwisata Air Terjun Semirang yang berlokasi di Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi terkait dengan fenomena penelitian yang sedang diteliti. Adapun informan yang dipilih dilihat dari karakteristik tertentu sehingga informan dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas, metode untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini menggunakan informan dengan tujuan tertentu dengan disesuaikan tema penelitian yang mana informan

tersebut dianggap memiliki informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dsesa Gogik
2. Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik
3. Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik

#### **1.9.4 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian didalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lainnya (Siyoto & Sodik, 2015: 81). Untuk dapat menetapkan fokus pada penelitian ini, peneliti bertindak dan berfungsi sebagai instrumen, menentukan informan dalam penelitian, melakukan pengumpulan data, memberikan penilaian kualitas terhadap data, melakukan analisa terhadap data, memberikan penafsiran pada data serta melakukan penulisan kesimpulan terhadap temuan penelitian.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Menurut Moleong (Siyoto & Sodik, 2015: 28) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang mana dapat berbentuk seperti pengucapan secara lisan maupun secara tertulis yang diamati oleh peneliti, sumber data juga harusnya asli, bagaimanapun apabila dalam memperoleh sumber data yang aslu sulit untuk didapatkan maka dengan menggunakan sumber data yang sudah difotokopi tidak menjadi masalah selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat berbentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan

kepada subjek yang dipercaya/ subjek penelitian (informan) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen grafis yang mana dapat berupa tabel, catatan, notulen rapat dan lainnya, foto-foto, dokumentasi video dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung atau memperkaya data primer.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan natural setting atau kondisi alamiah dan dalam penelitian kegiatan yang terpenting adalah pada pengumpulan data dan harus dipantau agar memperoleh data yang terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview atau wawancara dengan informan secara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi (Siyoto & Sodik, 2015: 77).

#### **1. Observasi**

Observasi menurut Usman dan Purnomo (Hardani et al., 2020: 128) merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sukmadinata (Hardani et al., 2020: 124) mengemukakan bahwa observasi merupakan sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Riyanto (Hardani et al., 2020: 165) sendiri observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian, dalam observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung merupakan pengamatan yang dilakukan

secara langsung atau tanpa alat kepada gejala subjek yang diteliti, sedangkan observasi tidak langsung merupakan pengamatan kepada gejala subjek yang diteliti dengan perantara sebuah alat.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu, pihak yang terlibat didalam wawancara adalah pewawancara atau interviewer yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewee yang memberikan jawaban atas oertanyaan yang diajukan, sedangkan Lincoln dan Guba (Hardani et al., 2020: 252) menegaskan maksud diadakannya wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainnya. Nazir (Hardani et al., 2020: 138) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses untuk memperoleh keterangan dari sebuah penelitian dengan melalui tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat *interview guide* atau panduan wawancara. Patton menjelaskan terdapat setidaknya enam jenis dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dimana setiap pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara berkaitan antara pertanyaan satu dengan salah satu pertanyaan yang lainnya.

- a. Pertanyaan yang menyangkut mengenai suatu pengalaman atau suatu perilaku
- b. Pertanyaan yang mana bersangkutan dengan suatu nilai maupun pendapat
- c. Pertanyaan yang mengakut mengenai perasaan
- d. Pertanyaan yang menyangkut tentang suatu keilmuan atau pengetahuan
- e. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera

f. Pertanyaan yang berkaitan dengan suatu latar belakang

Setelah melakukan wawancara, maka hasil wawancara harus segera dicatat, karena wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang sistematis terhadap hasil wawancara yaitu dengan mencatat mana data yang penting dan yang tidak penting. Data yang masih diragukan maka diperlukan wawancara kembali terhadap sumber-sumber data yang sudah diperoleh peneliti sebelumnya maupun terhadap sumber data yang baru yang bertujuan untuk mendapatkan ketuntasan serta kepastian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sugiyono (Hardani et al., 2020: 150) mendefinisikan dokumentasi sebagai sebuah pencatatan dari sebuah peristiwa yang telah terjadi, adapun bentuk dokumen dapat berupa gambar, karya bahkan tulisan dari seseorang. Dokumen yang berbentuk sebagai contoh adalah catatan harian, *life histories* atau sejarah kehidupan, catatan hidup seseorang, kebijakan, cerita. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya adalah foto, sketsa, gambar hidup dan lainnya, sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya adalah gambar, film, patung dan lainnya.

### 1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman (Hardani et al., 2020: 163) menjelaskan terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya adalah reduksi data, *data display* atau penyajian data, *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam pemilahan, penyederhanaan dari data kasar lapangan yang kemudian dituliskan didalam catatan. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, memilah, mengarahkan, menggolongkan serta mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan dapat dilakukan verifikasi. Reduksi data dapat terlihat bahkan pada saat peneliti memutuskan suatu kerangka konseptual yang dipilih, wilayah yang akan dijadikan sebagai penelitian, permasalahan yang ditemui dalam penelitian serta pendekatan yang dipilih oleh peneliti dengan menggunakan metode apakah yang dipilih dalam pengumpulan data, pada saat pengumpulan data berlangsung maka akan terjadi tahapan reduksi yaitu pemilihan data yang selanjutnya membuat ringkasan, memberikan kode, menelusuri tema, serta membuat catatan kaki, dan reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian. Menurut Riyanto (Hardani et al., 2020: 165) mendefinisikan reduksi data sebagai data yang perlu dirampingkan, dilakukan pemilihan mana yang penting, disederhanakan dan diabstraksikan, sehingga dalam reduksi ini terdapat proses *living in* yaitu data yang terpilih dan *living out* yaitu data yang terbuang atau tidak terpakai.

b. Penyajian Data atau *Data Display*

*Data display* menurut Miles & Huberman (Hardani et al., 2020: 167) merupakan sekumpulan informasi yang sudah terancang dan tersusun serta dapat memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan serta penentuan untuk mengambil langkah tindakan. Dengan adanya penyajian data ini dapat memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan penentuan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data didalam penelitian kualitatif biasanya dilaksanakan dengan berbagai bentuk seperti uraian yang singkat, gambar bagan, hubungan antara berbagai kategori dengan jenisnya, dengan melaukan penyajian data ini memberikan kemudahan bagi peneliti

untuk memahami peristiwa yang terjadi serta memberikan rencana kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing* atau Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dimana simpulan awal yang telah dikemukakan dapat berubah atau dapat dikatakan bersifat sementara apabila suatu bukti lainnya yang lebih kuat ditemukan yang mana dapat lebih mendukung pada saat tahap pengumpulan data yang akan dilakukan selanjutnya, namun apabila simpulan awal yang telah dikemukakan didukung oleh bukti yang konsisten dan valid maka simpulan yang telah dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel, dengan demikian simpulan didalam penelitian kualitatif memungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi juga tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat berada di lapangan (Hardani et al., 2020: 170-171).

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah temuan yang baru dimana sebelumnya belum pernah ada, dapat berbentuk suatu penggambaran atau deskripsi terhadap objek yang belum memiliki kejelasan sebelumnya sehingga setelah dilakukannya penelitian menjadi jelas.

